

Wawasan, 21 September 1992

Kesejahteraan Rakyat yang Merata: Kapan?

Oleh Faturochman*

Pembangunan di segala bidang terus berjalan di negeri ini. Berbagai kemajuan sudah tercapai dan ditargetkan akan meningkat. Misalnya, diutarakan pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai 1.000 dolar AS pada sekitar sepuluh tahun mendatang, atau, dua kali lipat pendapatan sekarang.

Bagi sebagian orang target perkiraan ini masuk akal. Perkiraan laju pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini, pencapaian target itu boleh dikatakan mengada-ada. Ada memang sebagian orang yang sinis menilai ramalan itu. Asumsinya antara lain karena pertumbuhan yang bisa dicapai di masa mendatang kemungkinan tidak seperti yang sekarang ini. Berbagai prasyarat yang harus dipenuhi ... banyak untuk tetap pada laju pertumbuhan itu. Terobosan-terobosan baru yang ... konon makin sulit. Belum lagi masalah lain yang bisa menjadi ganjalan, misalnya ketahanan politik beberapa tahun mendatang.

Ada baiknya kita berpihak pada kelompok yang optimis namun jangan sampai kehilangan daya analisis yang ... Taruhlah perkiraan kita mencapai GNP 1.000 dolar ... Bisa jadi keadaan seperti ini membanggakan kita sekarang. Namun seperti semula dikatakan para ahli, ... terus ada, tidak hanya ... masih ada kemiskinan tapi juga karena kelompok sering ditinggalkan kereta pembangunan.

Sementara masih ada kebijaksanaan yang jelas-jelas tidak menguntungkan kelompok miskin. Kebijakan berusana menjangkau lapisan bawah tidak mudah melaksanakannya. Pada tingkat pelaksanaan kebijaksanaan itu sering juga me!enceng... bekerja untuk dan dengan ... kelompok miskin sering ... tidak enak.

Konsep keadilan sosial

Dalam sejarah kita tercatat isu pemerataan ini menjadi picu pemberontakan. Yang menembakkan adalah PKI. Namun mereka itu pula yang tergelepar babak belur dan tidak diberi kesempatan hidup. Waktu itu kesenjangan kaya miskin sangat kentara. Jurang pemisah itu siap menelan si miskin dalam kesengsaraan. Namun tidak bagi si kaya. Maka ketika PKI menawarkan jembatan "sama rata, sama rasa" hidup terasa bergairah dirasakan oleh para fakir. Kampanye hidup *equal* bagi semua orang membuat mereka terseret untuk bergabung dalam wadah "partai rakyat". Alhamdulillah usaha itu gagal. Andaikan usaha itu tanpa embel-embel ideologi.....

Pemerataan dan keadilan sosial bisa dan sering silih berganti dipakai sebagai istilah. Banyak orang yakin adil tidak harus berarti merata, apalagi sarna rata bagi semua. Bagaimana mungkin pejabat di Jakarta harus pakai sepeda motor sama seperti pak lurah di satu desa di Bantul? Justru ini tidak adil. Setidaknya menurut pejabat dari Jakarta itu tadi.

Pola hidup sederhana justru dianggap tidak pas. Barangkali lebih tepat menerapkan pola hidup seadanya. Artinya, bila punya *Volvo* seri tujuh mengapa harus beli lagi sepeda motor yang perlu helm, jaket, dan lainnya. Itu namanya mengada-ada, bukan seadanya. Sebaliknya, makan siang untuk pegawai kecamatan di Gunung Kidul cukup nasi rames dan teh manis. Mereka tidak akan puas bila *lunch* terlalu banyak omong sedikit makan seperti yang dilakukan para pejabat bila ada rapat di hotel mewah. Singkatnya, ada keadilan bila kebutuhan-kebutuhan, yang berbeda-beda bisa dipenuhi. Yang butuh *Mercedes* merasa adil kalau dia bisa mendapatkannya, butuh sepeda juga begitu. Masalahnya, siapa butuh apa? Lagi pula, kapan kebuluhan itu terasa cukup dan berhenti di situ?

Ada formulasi keadilan sosial lain yang bagi penganutnya juga dianggap yang terbaik. Mereka menyebutnya *equity*. Yaitu, penerimaan sebanding dengan pengeluaran. Contohnya, sarjana mendapat bayaran seratus ribu dan tamatan SMA enam puluh ribu gaji di masa awal mereka kerja. Tentara yang sedang perang mendapat bayaran dua kali lipat dibanding temannya yang piket di markas. Konsep ini ternyata sulit diterapkan karena sulitnya dicari pembandingan absolut. Pernah sopir bus di Sydney yang dibayar sekitar enam puluh lima dolar sehari (baca: seratus ribu rupiah) bertanya: "Bagaimana nasib sopir bus di Indonesia yang gajinya lima ribu sehari. Dilihat dari nilai nominalnya jerih payah sopir kita seolah tidak ada artinya. Tapi cobalah pakai perhitungan yang lain. Dengan lima ribu gaji sopir tadi bisa beli rambutan lima kilo. Berapa kilo rambutan bisa dibeli dengan uang enam puluh lima dolar? Hitunglah sendiri kalau harga rambutan di Sydney sedolar untuk tiga butir.

Kombinasi

Kita cenderung untuk menolak konsep keadilan sama rata sama rasa. Disamping terlalu berbau komunis pada dasarnya konsep ini tidak akan bisa jalan pada masyarakat yang sudah menjalani proses pembangunan dan pematangan. Di negara-negara baru barangkali konsep ini bisa, meskipun peluang penerapannya juga kecil. Namun pada dasarnya konsep ini juga diterapkan meski hanya sebagian (kecil). Di negara-negara maju misalnya, orang miskin atau penganggur dan orang-orang tua diberi tunjangan hidup sejumlah tertentu.

Di Indonesia ketiga konsep itu ada meskipun sedikit. Pemerataan dalam bidang pendidikan terwujudnya dengan adanya wajib sekolah dasar mungkin berbau konsep yang pertama, bukan mengadopsi konsep komunis tentu saja. Konsep pemerataan berdasarkan kebutuhan juga ada. Dalam prakteknya, konsep ini bercampur tidak hanya kebutuhan sebagai pertimbangan, tetapi juga kemampuan masyarakat. Adanya fasilitas telepon yang mengutamakan masyarakat perkotaan adalah contohnya. Orang desa sementara dianggap belum butuh itu. Untuk komunikasi pak lurah bisa memukul kentongan. Untuk menyampaikan pesan pada seseorang, bisa dititipkan.

Kemampuan dan usaha yang dilakukan yang kemudian menghasilkan kesejahteraan tertentu seperti dalam konsep ketiga juga ada. Beberapa daerah yang punya potensi sumber alam mendapatkan dana yang cukup besar dibanding daerah yang sumber alamnya sedikit. Namun pembangunan anggaran negara tidak semata-mata berdasarkan pada pendapatan dan sumber alam setempat. Kalau konsep ini diterapkan seperti aslinya, barangkali yang akan muncul adalah semakin sengsaranya mereka yang di daerah miskin dan semakin kaya mereka yang tinggal di daerah subur.

Kombinasi yang ada tampaknya merupakan usaha untuk benar-benar bisa mendistribusikan kesejahteraan sebaik mungkin. Namun tidak ada sesuatu yang sempurna. Beberapa pelaksanaan kebijaksanaan melenceng dari arahnya. Ketika kebijaksanaan itu memtingkan pemerataan yang cenderung sama, yang dilaksanakan usaha pemerataan menurut kebutuhan. Kasus penyelewengan dana Bangdes, misalnya, ada yang disebabkan pejabatnya beranggapan orang desa tidak butuh banyak uang. Dialah yang lebih butuh, katanya.

Beberapa kebijaksanaan yang cenderung bias dan menguntungkan sekelompok orang tertentu juga sangat berbau asas keadilan berdasarkan kebutuhan. Artinya orang yang sudah maju memiliki kebutuhan yang lebih banyak. Padahal yang dibutuhkan justru sebaliknya. Pembagian yang abnyak mestinya diberikan kepada mereka yang kekurangan. Bukan melihat pada pendaaptan

perkapita semata-mata tidak cukup. Angka tersebut belum mencerminkan pemerataan.

Pemerataan

Apa yang perlu diratakan? Ketika semua orang menjadi miskin masalah pemerataan tidak dipersoalkan. Sebab, tidak perlu ada yang diratakan, maka kemiskinan itu sendirilah yang sudah merata. Dengan kata lain, tidak perlu lagi dipersoalkan karena semua orang sudah kebagian kemiskinan secara merata.

Masih banyak orang yang memperlumahkan kemiskinan di negeri ini. Bagi mereka pada kenyataannya masih banyak orang miskin. Jumlahnya sekitar 26 juta, sekitar satu setengah kali jumlah penduduk Australia. Sebagian yang lain menganggap masalah kemiskinan sudah teratasi. Buktinya, pendapatan rata-rata kita sudah tidak dibawah garis kemiskinan lagi. Disinilah kiranya permasalahan itu. Yang namanya pendapatan rata-rata tentu tidak berarti semua orang memiliki pendapatan sama rata. Dengan demikian pendapat yang pertama tadi tampaknya masih sangat relevan. Tepatnya, masih banyak kemiskinan dikarenakan belum meratanya hasil pembangunan.

Apabila kita kembali pada perkiraan kita bisa mencapai pendapatan perkapita yang tinggi itu, tampaknya bukan hanya ada pesimisme kesulitan mencapainya. Bila hanya sekedar mencapainya mungkin bisa. Sedangkan untuk meratakannya mungkin jauh lebih sulit lagi. Kritik terhadap pembagian diartikan secara relatif. Orang yang miskin secara absolut butuh bantuan lebih besar.

Dalam berbagai program ke arah pemerataan atau keadilan sosial, campur tangan dan hubungan pemerintah dengan rakyat jelas tidak terpisahkan. Dimasa yang lalu masyarakat lebih banyak diminta untuk memberikan pengabdian yang besar. Upeti dan persembahan untuk raja atau penguasa sebagai bentuk rasa hormat adalah bentuk konkritnya. Namun bila dikaji lebih mendalam, tidak pernah penguasa yang bisa bertahan lama bila hanya rakyat yang diminta terus berkorbandan mengabdikan. Sebaliknya banyak raja di zaman dulu yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Karena ada timbal balik yang sesuai rakyat tidak keberatan untuk mengabdikan.

Sekarang zaman telah berubah. Namun kita tidak pernah bisa lepas dari sejarah. Bahkan, sejarah terus berulang. Pola hubungan penguasa-rakyat juga harus sebanding. Tidak ada pemerintah yang bisa menjamin seratus persen kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya, tidak akan pernah ada masyarakat mandiri seratus persen tanpa bantuan dari pemerintah. Pola hubungan ini ternyata sangat terkontrol, terutama ketika rakyat harus berkorban terlalu banyak.

Mereka punya kekuatan tersendiri yang sulit diterka. Sebaliknya, penguasa yang lebih mementingkan rakyat akan selalu dipuja. Akan tetapi pada praktiknya hal ini sulit menjadi kenyataan. (03).

**Drs. Faturochman, MA dosen Fakultas Psikologi dan peneliti di Puslit Kependudukan UGM, Yogyakarta*